



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 24 Mei 2021

Halaman: 5

Kaji Penutupan Perlintasan Lempuyangan

■ Legislatif Minta Pemkot Matang Dalam Melangkah

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih melakukan kajian wacana menutup perlintasan sebidang Lempuyangan. Meski sudah ada *flyover* (jalan layang) yang jadi penghubung, dampak yang ditimbulkan ketika dilakukan penutupan tetap harus diperhatikan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengatakan, saat ini, di wilayahnya terdapat beberapa ruas jalan yang bersentuhan langsung dengan jalur kereta api. Seperti di Baciro, Timoho, Jalan HOS Cokroaminoto, sampai Lempuyangan.

Dari sejumlah perlintasan sebidang tersebut, yang sudah memiliki *flyover* baru Lempuyangan saja, sehingga timbul wacana penutupan. Sejauh ini, komunikasi dan koordinasi masih diupayakan dari berbagai lintas sektor, agar tidak muncul pihak yang merasa dirugikan.

"Makanya itu, kuncinya adalah koordinasi, tidak masing-masing kepentingan saja. Kalau sudah begitu, lantas tidak melihat aspek-aspek yang lain, ya pasti jadi tidak harmonis," terang Kadishub, Minggu (23/5).

Ia mengungkapkan, kondisi perlintasan sebidang di Kota Yogyakarta, meski yang sudah dilengkapi *fly over* sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan daerah kabupaten. Sebab, kepadatan lalu lintasnya jauh lebih tinggi, sehingga untuk menutupnya tidak semudah membalik telapak tangan.

"Kalau bicara keselamatan, kita sama-sama memahami,

PERHATIKAN DAMPAK

- Pemkot Yogyakarta mengkaji wacana menutup perlintasan sebidang Lempuyangan.
- Ada pertimbangan dampak yang ditimbulkan.
- Perlintasan sebidang ada di Baciro, Timoho, Jalan HOS Cokroaminoto, sampai Lempuyangan.

untuk kelancaran kereta api juga. Tapi, kondisinya itu jelas berbeda. Kalau dikompasikan tidak ketemu. Misal, antara Klaten dengan Kota Yogya, itu beda. Makanya kita carikan solusi terbaik, ngobrol dulu," katanya.

Menurutnya, studi akademis pun sudah pernah dilakukan terhadap program pemerintah pusat itu, termasuk dengan menyiapkan skenario lalu lintas saat perlintasan sebidang tersebut ditutup. Hanya saja, aspek-aspek sosial dan masyarakat juga harus diperhatikan.

"Kalau memang itu tidak ada perlintasan sebidang lagi, ya bagaimana kita upayakan, agar masyarakat, tanda kupit semakin nyaman. Nah, itu dia, kadang-kadang perlu pendalaman yang lebih," ungkapnya.

"Ini yang jadi pekerjaan rumah dan perlu disenergikan, ya. Saya lebih cenderung itu, sinergi agar *everybody happy* lah. Jadi, kepentingan-kepentingan itu, termasuk kepentingan masyarakat, terwadahi," lanjut Agus.

Sementara untuk perlintasan sebidang lainnya, di samping Lempuyangan, cukup berat untuk diwacanakan penutupan karena sarana yang belum memadai. Bukan tanpa sebab, mengupayakan pembangunan *fly over* di tengah situasi pandemi seperti ini jelas tak realistis.

"Untuk *flyover* dan sebagainya itu perlu duit. Ya, kita harus menata sistem keuangan. Dengan jumlah sedikit, tapi bisa melakukan langkah-langkah yang strategis, agar semua tercapai, tujuan-tujuannya," cetusnya.

"Kalau cuma sekadar membangun, ya cukup. Tapi, setelah itu biaya kesehatan kita tidak punya, untuk pendidikan kurang, kesannya kok malah besar pasak daripada tiang. Jangan sampai begitu," pungkas Agus.

Kalangan legislatif meminta pada Pemkot Yogyakarta, agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan soal wacana menutup perlintasan sebidang Lempuyangan. Sebab, masih dibutuhkan kajian dan rangkaian uji coba.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono menyampaikan, penutupan perlintasan sebidang memang harus dilaksanakan, karena sudah ditetapkan oleh pusat. Namun, daerah tetap wajib melihat kondisinya dahulu.

"Prinsipnya, itu aturan dari pusat, mau tidak mau, ya harus dilaksanakan, di setiap perlintasan. Tapi, dipikirkan dulu, alternatifnya, dampaknya," katanya, Minggu (23/5). (aka)

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005